

**LAPORAN
AKUNTABILITAS
KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH (LKIP)
TAHUN 2020**



**INSPEKTORAT
PROVINSI SUMATERA UTARA**





PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA
INSPEKTORAT

Jalan K.H.Wahid Hasyim Nomor 8 Telp. 061-4150461 – 4524309 – Fax. 061-4150194
M E D A N - 20154

**PERNYATAAN TELAH DIREVIU
INSPEKTORAT PROVINSI SUMATERA UTARA
TAHUN ANGGARAN 2020**

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Inspektorat Provinsi Sumatera Utara tahun anggaran 2020 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja, Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Inspektorat Provinsi Sumatera Utara.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akrual, andal dan absah.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Medan,

2021


INSPEKTUR,
INSPEKTORAT
LASRO MARBUN
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19641201 198701 1 002

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT., karena berkat rahmat dan karunia serta perkenanNya, Inspektorat Provinsi Sumatera dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Inspektorat Provinsi Sumatera Utara Tahun 2020.

Penyusunan laporan ini berdasarkan kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu unsur penyelenggara pemerintahan Negara dan Instruksi Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Setiap instansi pemerintah diwajibkan untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan suatu perencanaan strategis yang ditetapkan oleh masing-masing instansi.

Semoga laporan ini dapat bermanfaat khususnya bagi Inspektorat Provinsi Sumatera Utara maupun bagi Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara pada umumnya, sebagai salah satu upaya meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab.

Medan, 2021
INSPEKTUR
INSPEKTORAT
LASRO MARBUN
Pembina Utama Madya
NIP. 19641201 198701 1 002

INSPEKTORAT PROVSU

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Gambaran Umum Inspektorat Provinsi Sumatera Utara

Inspektorat Daerah Provinsi mempunyai tugas membantu Gubernur dalam membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan.

Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 46 tahun 2017 tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Utara menyatakan bahwa Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Utara merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dipimpin oleh Inspektur yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah. Pada Tahun 2019 telah diterbitkan Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 21 Tahun 2019 tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Utara tetapi Peraturan tersebut belum diimplementasikan.

Untuk melaksanakan tugas tersebut Inspektorat Provinsi menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitas pengawasan;
- b. Pelaksanaan Pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya;
- c. Pelaksanaan Pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Gubernur;
- d. Penyusunan laporan hasil pengawasan;
- e. Pelaksanaan administrasi Inspektorat Daerah Provinsi; dan
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

Inspektorat Provinsi Sumatera Utara dipimpin oleh seorang Inspektur setingkat eselon II, Inspektur dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah. Dalam melaksanakan tugasnya Inspektur didukung oleh seorang Sekretaris dan 5 (lima) Inspektur Pembantu, yaitu: a) Inspektur Pembantu Wilayah I; b) Inspektur Pembantu Wilayah II; c) Inspektur Pembantu Wilayah III; d) Inspektur Pembantu Wilayah IV; dan e) Inspektur Pembantu Khusus. Dalam praktek pelaksanaan tugas pembinaan dan pengawasan di lingkungan pemerintah

daerah, Inspektur dibantu oleh Kelompok Jabatan Fungsional, yang terdiri dari Jabatan Fungsional Auditor (JFA) dan Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah (P2UPD).

Gambar 1.1
Struktur Organisasi Inspektorat Provsu



Saat ini Inspektorat Provinsi Sumatera Utara memiliki jumlah tenaga fungsional auditor 37 orang dan 55 orang tenaga fungsional P2UPD dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 1.1 Jumlah Pegawai Inspektorat Provinsi Sumatera Utara

NO	URAIAN	JUMLAH
	Jumlah Pejabat Fungsional Auditor :	37
1.	Auditor Ahli Madya	7
2.	Auditor Ahli Muda	20
3.	Auditor Ahli Pertama	10
4.	Auditor Penyelia	-
5.	Auditor Pelaksana Lanjutan	-
6.	Auditor Pelaksana	-
	Jumlah Pejabat Fungsional P2UPD :	55
7.	Pengawas Pemerintahan Madya	34
8.	Pengawas Pemerintahan Muda	19
9.	Pengawas Pemerintahan Pertama	2
	Jumlah Pejabat Struktural dan Staf :	81
10.	Inspektur	1
11.	Sekretaris	1
12.	Inspektur Pembantu	3
13.	Kasubbag	3
14.	Staf (Pelaksana)	51
15.	PNS Titipan	4
15.	Non PNS	18

	TOTAL JUMLAH SDM APIP	173
--	------------------------------	------------

1.2 Peran Strategis Inspektorat Provinsi Sumatera Utara

Inspektorat Provinsi Sumatera Utara merupakan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara. Selaku aparat pengawasan internal, Inspektorat Provinsi Sumatera Utara mempunyai peran strategis yang tidak lepas dari peran mutakhir internal audit. Peran mutakhir tersebut tercantum dalam statemen *The Institutes of Internal Auditors* (IIA): "Internal audit adalah sebuah desain aktifitas yang independen, menjamin pencapaian tujuan dan pelayanan konsultasi untuk memberi nilai tambah dan meningkatkan tata kelola organisasi. Internal audit membantu sebuah organisasi dalam mencapai tujuannya dengan membawa sebuah pendekatan disiplin yang sistematis untuk mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko, kontrol dan proses tata kelola."

Peran mutakhir internal audit diatas sejalan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, secara rinci dijelaskan pada Pasal 11 yang menyatakan bahwa perwujudan peran APIP yang efektif sekurang-kurangnya mampu:

1. Memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi, serta efektifitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah;
2. Memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektifitas manajemen risiko, dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah;
3. Memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah.

Pada Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 209 ayat (1) keberadaan kelembagaan Inspektorat lebih dikukuhkan dengan disebutkan secara eksplisit tersendiri. Hal tersebut, mengindikasikan bahwa peran strategis oleh Inspektorat akan ditingkatkan, disamping tugas pengawasan yang telah dilaksanakan selama ini Inspektorat juga melaksanakan tugas pembinaan mewakili Gubernur. Tercantum pada Pasal 216 ayat (2): Inspektorat daerah mempunyai tugas membantu kepala daerah membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh perangkat daerah dan

Pasal 379 ayat: (1) Gubernur sebagai kepala daerah provinsi berkewajiban melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat daerah provinsi; dan (2) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur dibantu oleh Inspektorat provinsi. Pada peraturan sebelumnya tugas inspektorat hanya difokuskan pada tugas pengawasan (UU 32/2004 pasal 218, Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) melaksanakan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah. Lebih lanjut pada Pasal 385, Inspektorat juga diberi tugas berkoordinasi/sinergi dengan aparat penegak hukum dalam menangani kasus pengaduan masyarakat.

Selanjutnya beberapa peraturan perundangan terbaru juga meningkatkan peran strategis Inspektorat. Saat ini Inspektorat semakin dilibatkan pada hampir setiap proses manajemen (*Planning, Organizing, Actuating, and Controlling*). Pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Inspektorat diamanatkan harus terlibat dalam proses perencanaan dan penganggaran melalui kegiatan reviu perencanaan dan anggaran. Melalui reviu ini Inspektorat dituntut bisa secara langsung membina, memberi saran dan perbaikan terhadap perencanaan anggaran Perangkat Daerah (PD) dan PPKD Provinsi Sumatera Utara.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, pada pasal 33 ayat (3) menyatakan bahwa Aparat pengawasan intern pemerintah pada kementerian/lembaga/pemerintah daerah melakukan reviu atas laporan keuangan dan kinerja dalam rangka meyakinkan keandalan informasi yang disajikan sebelum disampaikan oleh Menteri/Pimpinan Lembaga/Gubernur /Bupati /Walikota kepada pihak-pihak sebagaimana diatur dalam pasal 8 dan pasal 11. Hal tersebut diperkuat dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pasal 28 Inspektorat atau APIP harus melakukan reviu atas Laporan Kinerja dalam rangka meyakinkan keandalan informasi yang disajikan sebelum disampaikan Gubernur. Terkait dengan hal tersebut, Inspektorat harus mengevaluasi Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) OPD Provinsi dan membina mereka sehingga nilai akuntabilitas mereka meningkat serta berkontribusi pada perbaikan nilai akuntabilitas Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara. Lebih lanjut ada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB) Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pasal 3 ayat (2), bahwa "Inspektorat pemerintah provinsi

harus membantu Kementerian PAN RB untuk melakukan evaluasi atas implementasi SAKIP pemerintah kabupaten/kota di bawah supervisi dari tim bersama yang terdiri dari Kementerian PAN RB dan Kementerian Dalam Negeri”.

Peraturan berikutnya adalah Keputusan Presiden Nomor 20 Tahun 2015 tentang Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi APBN/APBD (TEPRA), dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2017 tentang Percepatan Proyek Strategis Nasional. Peraturan-peraturan tersebut mangamanatkan: Pertama, bahwa Inspektorat harus mengidentifikasi hambatan pelaksanaan lelang sebelum terbitnya anggaran sebagai upaya percepatan pelaksanaan lelang begitu Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) disahkan. Kedua, Inspektorat bisa memberikan solusi/saran perbaikan atas hambatan dalam pelaksanaan lelang Pra-DPA.

Beberapa hal tersebut menunjukkan bahwa peran Inspektorat Provinsi Sumatera Utara sangat strategis, tidak hanya bertugas untuk mencari dan menemukan penyimpangan atau kecurangan dalam organisasi, tetapi mengedepankan pencegahan terhadap terjadinya penyimpangan dan kecurangan, serta memberikan jaminan efektivitas dan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi Inspektorat. Inspektorat Provinsi Sumatera Utara berfungsi pula meyakinkan keandalan informasi laporan keuangan dan laporan kinerja.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1 Perencanaan Kinerja Inspektorat Provinsi Sumatera Utara

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, perencanaan stratejik merupakan langkah awal yang harus dilakukan agar mampu menjawab tuntutan lingkungan stratejik lokal, nasional dan global, dan tetap berada dalam tata Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan pendekatan perencanaan stratejik yang jelas dan sinergis, instansi pemerintah dapat menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi, peluang dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kinerjanya.

Dengan memperhatikan dan mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan, tantangan dan peluang yang ada di Sumatera Utara, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara telah menetapkan Visi untuk Tahun 2019–2023 yaitu :

“Sumatera Utara yang Maju, Aman dan Bermartabat”

Dalam rangka pencapaian visi pembangunan jangka menengah Provinsi Sumatera Utara, maka ditetapkan 5 (lima) misi pembangunan jangka menengah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019 - 2023, yaitu sebagai berikut:

- a. Mewujudkan masyarakat Sumatera Utara yang bermartabat dalam kehidupan;
- b. Mewujudkan Sumatera Utara yang bermartabat dalam politik;
- c. Mewujudkan Sumatera Utara yang bermartabat dalam Pendidikan;
- d. Mewujudkan Sumatera Utara yang bermartabat dalam Pergaulan;
- e. Mewujudkan Sumatera Utara yang bermartabat dalam Lingkungan.

Dalam mewujudkan Visi dan Misi Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, Inspektorat Provinsi Sumatera Utara berada pada Misi kedua RPJMD Provinsi Sumatera Utara 2019-2023 yaitu mewujudkan Sumatera Utara yang bermartabat dalam politik dengan adanya pemerintahan yang bersih dan dicintai, tata kelola pemerintah yang baik, adil, terpercaya, politik yang beretika, masyarakat yang berwawasan kebangsaan dan memiliki kohesi sosial yang kuat serta harmonis. Dengan Indikator Kinerja Utama Provinsi yang memiliki tujuan mewujudkan masyarakat Sumatera Utara yang bermartabat dalam politik, untuk mencapai visi kedua indikator tujuannya adalah

indeks demokrasi. Tujuan dari Indikator Kinerja Utama Provinsi memiliki 3 (tiga) sasaran yaitu:

1. Mewujudkan pemerintah yang bersih dan dicintai, tata kelola pemerintah yang baik, adil, terpercaya;
2. Mewujudkan politik yang beretika;
3. Mewujudkan masyarakat yang berwawasan kebangsaan dan memiliki kohesi sosial yang kuat serta harmonis.

Terhadap 3 (tiga) sasaran tersebut diatas, Inspektorat Provinsi Sumatera Utara memiliki keterkaitan dengan sasaran nomor 1 (satu) yaitu mewujudkan pemerintahan yang bersih dan dicintai, tata kelola pemerintah yang baik, adil, terpercaya. Dalam upaya mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Provinsi Sumatera Utara tersebut, dan untuk meningkatkan peran dan kinerja, profesionalisme serta mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Provinsi Sumatera Utara, maka perlu dirumuskan Visi dan Misi, yang ingin dicapai dalam lima tahun secara berkesinambungan. Dalam mencapai visi dan misi Inspektorat menetapkan tujuan dan sasaran pada Rencana Strategis Inspektorat Provinsi Sumatera 2019-2023, dengan tujuan terciptanya tatakelola pemerintahan yang bersih dan dicintai, tata kelola pemerintahan yang baik, adil, terpercaya.

Indikator Tujuan Inspektorat Provinsi Sumatera Utara adalah "**Indeks Reformasi Birokrasi**" yang memiliki sasaran sebagai berikut :

1. Meningkatkan tata kelola pemerintahan di bidang keuangan
Adapun Indikator Sasaran pertama adalah sebagai berikut:
 - a) Opini BPK-RI terhadap LKPD Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.
 - b) Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI pada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.
 - c) Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Itjen Kemendagri pada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.
 - d) Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Inspektorat pada OPD Provinsi Sumatera Utara dan Kabupaten/Kota
2. Meningkatnya pelaksanaan reformasi birokrasi
Adapun Indikator Sasaran kedua adalah sebagai berikut:
 - a) Level Maturitas SPIP Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara.
 - b) Level Kapabilitas APIP Inspektorat Provinsi Sumatera Utara.
 - c) Persentase nilai MCP-KPK Provinsi Sumatera Utara.

d) Nilai Rata-rata Evaluasi SAKIP OPD Provinsi Sumatera Utara.

Dari 6 (enam) Indikator kinerja terdapat 6 (empat) Indikator Kinerja Utama Inspektorat Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023, yaitu sebagai berikut:

1. Opini BPK-RI terhadap LKPD Pemerintahan Provinsi Sumatera Utara.
2. Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK-RI pada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.
3. Level Maturitas SPIP Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara.
4. Level Kapabilitas APIP Inspektorat Provinsi Sumatera Utara.

2.2. Perjanjian Kinerja Inspektorat Provinsi Sumatera Utara

Dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Perjanjian Kinerja merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan Program/Kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian tersebut diharapkan akan terwujud komitmen atas pencapaian target kinerja terukur yang telah ditetapkan antara penerima amanah (Kepala Perangkat Daerah) dan pemberi amanah (Gubernur Sumatera Utara) berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Perjanjian Kinerja Inspektorat Provinsi Sumatera Utara disusun berdasarkan Rencana Kinerja Tahun 2019 yang merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Inspektorat Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023. Renstra tersebut merupakan acuan dalam mewujudkan visi dan melaksanakan misi Inspektorat yang dijabarkan melalui tujuan yang hendak dicapai dalam 5 (lima) tahun dan sasaran yang hendak dicapai dalam setiap tahun.

Tabel 2.1
Perjanjian Kinerja

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET 2020
1	2	3	4
1	Meningkatnya tata kelola pemerintahan di bidang keuangan	1 Opini BPK-RI terhadap LKPD Pemerintahan Provinsi Sumatera Utara	WTP
2	Meningkatnya tata kelola pemerintahan di bidang keuangan	1 Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI pada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara	82%

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET 2020
1	2	3	6
		3 Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Inspektorat pada OPD Provinsi Sumatera Utara dan Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara	77%
3	Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	1 Level Maturitas SPIP Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara sesuai PP No. 60 Tahun 2008, unsur pengendalian terdiri dari 5 unsur yaitu: Lingkungan pengendalian Penilaian Resiko Kegiatan Pengendalian Informasi dan komunikasi Pemantauan dan pengendalian internal	Level 3
4	Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	1 Meningkatnya level kapabilitas APIP Inspektorat, sesuai Perka BPKP No.16 Th. 2015, kapabilitas diukur dari 6 elemen area perubahan yaitu : Peran dan layanan Manajemen SDM Praktik profesional Akuntabilitas dan manajemen kinerja Hubungan dan budaya organisasi Struktur tatakelola	Level 2 menuju level 3 dengan peningkatan nilai

Pada tahun 2020, Inspektorat Provinsi Sumatera Utara melakukan revisi terhadap indikator sasaran pada Perjanjian Kinerja yang terdiri dari 4 (empat) Indikator Kinerja Utama dengan menghilangkan salah satu indikator sasaran yaitu "meningkatnya kualitas penyelenggaraan urusan wajib dan pilihan pemerintah daerah".

2.3. Alokasi Anggaran Inspektorat Provinsi Sumatera Utara

Dukungan anggaran yang disediakan dalam rangka pencapaian target sasaran Inspektorat Provinsi Sumatera Utara tahun 2020 (setelah perubahan APBD) seluruhnya mencapai Rp.51.369.112.372,- yakni terdiri dari:

1. Belanja Langsung sebesar Rp.33.010.572.000,-
2. Belanja Tidak Langsung sebesar Rp.18.358.540.372,-

Tabel 2.2
Alokasi Anggaran Inspektorat Tahun 2020

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN (Rp)
1	2	3
I	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	4,883,131,750
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	75,496,000
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	932,400,000
3	Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran	1,318,769,440
4	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	1,679,008,800
5	Penyediaan Alat Tulis Kantor	98,549,610
6	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	174,998,900
7	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	11,868,000
8	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	40,500,000
9	Penyediaan Makan dan Minuman	179,200,000
10	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	372,341,000
II	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1,522,904,760
1	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	148,738,000
2	Pengadaan Meubelair	-
3	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	769,998,815
4	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	458,842,945
5	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	139,325,000
6	Pengadaan Peralatan Penunjang Pengawasan	-
7	Perayaan Hari-hari Besar	6,000,000
III	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	-
1	Pengadaan pakaian Dinas	-
IV	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	197,081,400
1	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	24,137,400
2	Peningkatan Manajemen Aset/Barang Daerah	69,000,000
3	Bimbingan Jasmani PNS di Lingkungan Inspektorat	-
4	Pengolahan Data SIMPEG	17,744,000
5	Family Gathering Inspektorat Provsu	-
6	Pengembangan sistem informasi manajemen pengawasan terintegrasi	86,200,000

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN (Rp)
V	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	284,632,210
1	Penyusunan Renja dan P.Renja, RKA Tahunan dan RKA-P, DPA dan DPPA serta Renstra SKPD	183,842,460
2	Penyusunan Laporan Kinerja Inspektorat Provinsi Sumatera Utara	31,200,000
3	Penyusunan LKPJ dan LPPD	13,500,000
4	Penyusunan CaLK, LRA dan NERACA	37,289,750
5	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	18,800,000
VI	Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Negara	11,470,790,252
1	Pelatihan Kantor Sendiri (PKS)	7,200,000
2	Rapat Koordinasi Pengawasan Daerah	8,900,000
3	Koordinasi dan Konsultasi Program Pengawasan dan Tugas Lain dengan Kantor Kementerian, Setneg serta Itjen Kementerian dan Inspektorat Provinsi Lainnya	70,000,000
4	Survey Penilaian Integritas dan Kepuasan Masyarakat	-
5	Pemeriksaan Tujuan Tertentu	449,820,000
6	Penanganan Kasus Pengaduan Masyarakat dilingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara	1,578,833,348
7	Pembinaan dan Pengawasan Umum Teknis oleh Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Se-Sumatera Utara	-
8	Pembinaan dan Pengawasan OPD dan BUMD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Audit Kinerja)	4,211,188,700
9	Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Se-Sumatera Utara	740,400,100
10	Monitoring Persiapan Pelaksanaan dan Evaluasi Terhadap Penyelesaian TLHP BPK RI Perwakilan Provsu	204,700,000
11	Monitoring dan Evaluasi SAKIP pada OPD Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota	163,539,000
12	Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Derah	123,595,000
13	Reviu Dokumen Perencanaan dan Pembangunan serta Pelaksanaan Kinerja Pelaksanaan Anggaran	253,764,800
14	Monitoring dan Evaluasi TLHP Inspektorat Provinsi pada Pemerintah Kabupaten/Kota se-Sumatera Utara	308,900,000
15	Penunjang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Sumatera Utara	1,209,600,000
16	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Itjen Kemendagri	45,900,000
17	Pemeriksaan penggunaan dana BOS SMA/SMK se-Sumatera Utara	11,377,000
18	Monitoring dan Evaluasi Pelayanan Publik	58,059,804

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN (Rp)
19	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Inspektorat Provinsi Sumatera Utara pada OPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara	200,000,000
20	Monitoring dan Evaluasi LHKPN/LHKASN di Lingkungan Pemprov	31,200,000
21	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Dana Desa	-
22	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Penanganan Kasus Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara	98,028,000
23	Pendukung Kegiatan Sekretariat JFA /P2UPD	150,000,000
24	Peran serta Inspektorat dalam RAKORWASNAS	-
25	Monitoring dan Evaluasi Penerapan Reformasi Birokrasi & Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani	88,701,000
26	Peningkatan Nilai Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SIPI) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara	120,000,000
27	Rapat Koordinasi Pemutakhiran Data TLHP Inspektorat Provinsi dengan OPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara	700,000
28	Rapat Koordinasi Pembahasan TLHP BPK dengan OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara	700,000
29	Pra Pemutakhiran Data Hasil Pemeriksaan Itjen Depdagri dan Departemen lainnya serta Pengaduan Masyarakat	-
30	Rapat Pemutakhiran Data Hasil Pemeriksaan Itjen Kemendagri dan Pengaduan Masyarakat	21,905,300
31	Koordinasi dan Pendampingan terhadap pemeriksaan yang dilakukan BPK RI pada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara	42,200,000
32	Rapat Koordinasi Pemutakhiran Data TLHP Inspektorat Provinsi Sumatera Utara dengan Inspektorat Kabupaten/Kota se Sumatera Utara	2,721,000
33	Rapat Koordinasi Pembahasan dan Penyusunan Peta Pengawasan/PKPT Inspektorat Provinsi Sumatera Utara pada Pemerintah Kabupaten/Kota Se-Sumatera Utara	49,233,800
34	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Peta Pengawasan/PKPT dan Penerapan Kebijakan Pengawasan Inspektorat Provinsi Sumatera Utara pada Pemerintah Kabupaten/Kota Se-Sumatera Utara	69,709,000
35	Pelatihan Peningkatan Kapasitas Tenaga Auditor dan P2UPD serta Fungsional Umum	76,038,200
36	Sekretariat Rencana aksi program koordinasi supervisi pencegahan (Korsupgah) KPK-RI pada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara	166,854,200
37	Sapu Bersih Pungutan Liar di Provinsi Sumatera Utara	840,490,000
38	Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Responsiv Gender	-
39	Peningkatan Nilai Kapabilitas Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP)	60,232,000
40	Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stratnas-PK) dan Strasda pada Provinsi Sumatera Utara	6,300,000
41	Fasilitasi/Pembentukan Kerjasama antar daerah dalam Pengawasan yang lebih komprehensif	-
BELANJA LANGSUNG		18,368,640,372
BELANJA TIDAK LANGSUNG		33,010,672,000
JUMLAH		51,369,112,372

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Pengumpulan Data Kinerja

Dalam kerangka pengukuran Akuntabilitas Kinerja terdapat tahapan penetapan, pengumpulan data kinerja dan cara penghitungan/pengukuran kinerja. Pengumpulan data capaian kinerja diarahkan untuk mendapatkan data capaian kinerja yang akurat, lengkap, tepat waktu dan konsisten, yang berguna bagi pengambilan keputusan dalam rangka perbaikan kinerja Inspektorat Provinsi Sumatera Utara tanpa meninggalkan prinsip-prinsip keseimbangan biaya dan manfaat, efisiensi dan efektifitas. Untuk itu, dibangun sistem informasi kinerja yang mengintegrasikan data yang dibutuhkan dari unit-unit yang bertanggungjawab dalam pencatatan, secara terpadu dengan sistem informasi yang ada. Hal tersebut dilakukan dengan mewajibkan penyampaian laporan data kinerja secara reguler: bulanan, triwulan dan seterusnya dari masing-masing Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) ke Sub Bagian Program, Akuntabilitas dan Informasi Publik selaku penanggungjawab penyusunan Laporan Kinerja Inspektorat.

Pengukuran capaian kinerja Inspektorat dilakukan dengan menggunakan indikator sasaran kinerja. Pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja. Data kinerja diperoleh melalui 2 (dua) sumber, yaitu: (1) data internal yang berasal dari sistem informasi yang diterapkan pada Inspektorat (laporan keuangan dan laporan pelaksana kegiatan), dan (2) data eksternal yang berasal dari luar Inspektorat, baik data primer maupun data sekunder.

Pengumpulan data capaian kinerja untuk indikator kinerja kegiatan yang terdiri dari indikator-indikator masukan, keluaran dan hasil dilakukan secara terencana dan sistematis setiap tahun untuk mengukur kehematan, efektifitas, efisiensi dan kualitas pencapaian sasaran. Sedangkan pengumpulan data kinerja untuk Indikator Kinerja Utama (IKU) diukur pada akhir periode selesainya seluruh program/ kegiatan dalam rangka mengukur keberhasilan dari Inspektorat. Pengukuran kinerja mencakup:

- a. Tingkat pencapaian Indikator Kinerja Utama yang merupakan tingkat keberhasilan Inspektorat dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP);
- b. Tingkat pencapaian sasaran instansi pemerintah yang merupakan tingkat pencapaian target (rencana tingkat capaian) dari masing-masing indikator sasaran yang telah ditetapkan sebagaimana dituangkan dalam dokumen

Rencana Kinerja. Pengukuran tingkat pencapaian sasaran didasarkan pada data hasil pengukuran kinerja kegiatan.

"Perhitungan Capaian Kinerja"

Perhitungan persentase pencapaian target memperhatikan karakteristik komponen realisasi dalam kondisi:

- a. Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, maka digunakan rumus:

$$\% \text{ Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana/ Target}} \times 100\%$$

- b. Semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian kinerja maka digunakan rumus:

$$\% \text{ Capaian} = \frac{\text{Rencana (Realisasi - Rencana)}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Untuk memahami pencapaian kinerja ditetapkan dengan status capaian sebagai berikut:

- >100% adalah Baik Sekali (BS);
- 80% s.d 100% adalah Baik (B);
- 60% s.d 80% adalah Cukup (C);
- <60% adalah Kurang (K).

Pengukuran kinerja dimaksud dilakukan dengan menggunakan formulir Pengukuran Kinerja sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

3.2 Capaian Kinerja Inspektorat Provinsi Sumatera Utara

Capaian kinerja merupakan dasar dalam menilai keberhasilan ataupun kegagalan dalam pelaksanaan kegiatan, yang sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Inspektorat Provinsi Sumatera Utara. Tahun 2020 merupakan tahun kedua dalam periode 2019-2024.

Adapun pencapaian masing-masing sasaran terhadap target yang direncanakan dalam tahun 2020, perbandingan dengan tahun sebelumnya adalah sebagai berikut:

1. Capaian Kinerja Tahun 2020

Tabel 3. 1 Capaian Kinerja Tahun 2020

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Target	Realisasi	Capaian	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
1.	Meningkatnya tata kelola pemerintahan di bidang keuangan	1. Opini BPK-RI terhadap LKPD Pemerintah Provinsi Sumatera Utara	WTP	WTP	100%	B
2.	Meningkatnya tata kelola pemerintahan di bidang keuangan	1. Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI pada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara	82%	83,64%	100%	B
		2. Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Itjen Kemendagri pada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara	100%	100%	100%	B
		3. Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Inspektorat pada OPD Provinsi Sumatera Utara dan Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara	77%	78,87%	100%	B
3.	Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	1. Level Maturitas SPIP Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara sesuai PP No.60 Thn 2008	Level 3	Level 3 terdefinisi	100%	B

INSPEKTORAT PROVSU

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Target	Realisasi	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
4.	Meningkatnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi	1. Meningkatnya level Kapabilitas APIP Inspektorat sesuai Perka BPKP No.16 Tahun 2015	Level 2 menuju level 3 dengan peningkatan nilai	Level 2 Plus	100% B

2. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2019 dengan Tahun 2020

Tabel 3.2 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2019 dan 2020

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Tahun 2019	Tahun 2020	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Meningkatnya tata kelola pemerintahan di bidang keuangan	1. Opini BPK RI terhadap LKPD Pemerintah Provinsi Sumatera Utara	WTP	WTP	Opini WTP dipertahankan, hal ini terkait dengan kegiatan pembinaan/pendampingan yang dilakukan/melibatkan Inspektorat, melalui kegiatan pendampingan penyusunan pada Laporan, asistensi stock opname barang dan reviu LKPD.
2.	Meningkatnya tata kelola pemerintahan di bidang keuangan	1. Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI pada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara	81,67%	83,64%	Penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK semakin meningkat tiap tahunnya. Dikarenakan Inspektorat terus melakukan upaya agar temuan-temuan tersebut cepat diselesaikan.
		2. Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Itjen Kemendagri pada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara	100%	100%	Penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan Itjen Kemendagri semakin meningkat tiap tahunnya. Dikarenakan Inspektorat terus melakukan upaya agar temuan-temuan tersebut cepat diselesaikan.
		3. Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Inspektorat	75%	78,87%	Penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan Inspektorat Provsu semakin meningkat tiap tahunnya. Dikarenakan Inspektorat terus melakukan upaya

			pada OPD Provinsi Sumatera Utara dan Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara			agar temuan-temuan tersebut cepat diselesaikan.
3.	Meningkatnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi	1.	Level Maturitas SPIP Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara sesuai PP No.60 Tahun 2008	Level 3	Level 3 terdefinisi	Dalam hal ini Inspektorat sejak pertengahan Tahun 2018 intensif melakukan pendampingan dan sosialisasi terhadap 13 OPD yang menjadi sampel penilaian nilai maturitas SPIP dalam kegiatan implementasi SPIP pada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan sudah keluar hasil sementara yakni level 3 terdefinisi.
4.	Meningkatnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi	1.	Meningkatnya level Kapabilitas APIP Inspektorat sesuai Perka BPKP No.16 Tahun 2015	Level 2 menuju Level 3	Level 2 Plus	Inspektorat Provsu sudah menyiapkan banyak data dukung yang belum terpenuhi dan perbaikan data dukung untuk di QA dan sudah keluar hasilnya pada bulan Januari 2021 yakni Level 2 Plus.

3.3 Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Pencapaian Kinerja Tahun 2020

Evaluasi dan analisis pencapaian kinerja dilakukan dalam rangka untuk mengetahui sejauh mana keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran yang telah ditetapkan oleh Inspektorat Provinsi Sumatera Utara, kendala atau hambatan apa saja yang timbul dalam pelaksanaannya dan langkah antisipatif serta strategi apa saja yang diambil atau dilakukan untuk mengatasi segala kendala/hambatan tersebut.

Berikut adalah hasil evaluasi dan analisis atas pencapaian sasaran berikut keberhasilan dan kegagalannya melalui kegiatan yang dilaksanakan Inspektorat Provinsi Sumatera Utara selama Tahun 2020.

1. Sasaran Pertama: Meningkatkan tata kelola pemerintahan di bidang keuangan.

- **Opini BPK-RI terhadap LKPD Pemerintahan Provinsi Sumatera Utara**

Target: WTP, realisasi: WTP, capaian kinerja: 100% (BAIK)

Keberhasilan pencapaian kinerja dikarenakan:

1. Inspektorat sudah menyiapkan Tim Reviu yang kompeten dan telah dibekali pengetahuan;

2. Koordinasi yang terus menerus dengan BPK-RI Perwakilan Daerah Provinsi Sumatera Utara;
3. Memberikan bimbingan penyusunan pelaporan keuangan berbasis akrual dan asistensi *stock opname* barang ke seluruh Perangkat Daerah Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara.

2. Sasaran Pertama: Meningkatnya tata kelola pemerintahan di bidang keuangan.

- **Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI terhadap LKPD pada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.**

Target: 82%, realisasi: 83,64%, capaian kinerja: 100 % (BAIK)

Keberhasilan capaian kinerja dikarenakan:

1. Inspektorat terus melakukan monitoring secara berkala untuk tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI.
2. Koordinasi yang *intensive* dengan BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara.

- **Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan Itjen Kemendagri pada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.**

Target: 100%, realisasi: 100%, capaian kinerja: 100 % (BAIK)

Keberhasilan capaian kinerja dikarenakan:

1. Inspektorat terus melakukan monitoring secara berkala untuk tindak lanjut hasil pemeriksaan Itjen Kemendagri.
2. Koordinasi yang *intensive* dengan Itjen Kemendagri.

- **Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan Inspektorat pada OPD Provinsi Sumatera Utara dan Kabupaten/Kota Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.**

Target: 77%, realisasi: 78,87%, capaian kinerja: 100 % (BAIK)

Keberhasilan capaian kinerja dikarenakan:

1. Inspektorat terus melakukan monitoring secara berkala dan melakukan Rapat Koordinasi Tindak Lanjut Pemeriksaan Inspektorat Provinsi Sumatera Utara.
2. Koordinasi yang *intensive* dengan OPD dan Pemerintah Kabupaten/Kota di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.

Rincian hasil tindak lanjut pemeriksaan BPK-RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara:

a. BPK RI Perwakilan Provsu

Temuan 2020

1) Temuan

Hasil Pemeriksaan BPK-RI Perwakilan Provsu pada 49 OPD Pemerintah Provinsi Sumatera Utara TA. 2020 terdapat 577 temuan dan 1.522 rekomendasi.

2) Hasil tindak lanjut

Tindak lanjut yang telah dilakukan terhadap 1.522 rekomendasi adalah sebagai berikut :

- | | |
|---------------------------------------|-------------------|
| 1. Kategori selesai (S) | : 1.273 (83,64 %) |
| 2. Kategori dalam proses (D) | : 207 (13,6 %) |
| 3. Kategori belum ditindaklanjuti (B) | : 42 (2,75 %) |

3) Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK-RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara pada OPD Pemerintahan Provinsi Sumatera Utara berdasarkan hasil pemutakhiran per- Desember 2020 sebesar 83,64%.

b. Pemeriksaan Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri TA. 2020

Temuan 2020

Dari hasil pemeriksaan reguler yang dilakukan Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri pada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara TA. 2019 terdapat 18 temuan dan 29 rekomendasi TA 2019 pada OPD provsu. Dari 29 rekomendasi tersebut, seluruhnya sudah selesai di tindak lanjuti dengan nilai 100% peridakat baik.

Uraian tersebut di atas dapat dilihat pada tabel berikut:

Jumlah Temuan	Jumlah Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		S / (%)	D / (%)	B / (%)
18	29	29 (100%)	-	-

Rincian hasil tindak lanjut pemeriksaan Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara:

c. Kabupaten/Kota

Temuan 2020

1) Temuan

Hasil Pemeriksaan Reguler Inspektorat Provinsi Sumatera Utara pada 33 Kabupaten/Kota TA. 2020 terdapat 5.399 temuan dan 6.957 rekomendasi dengan nilai kerugian negara/daerah sebesar Rp 164.064.180.595,89.

2) Hasil tindak lanjut

a) Tindak lanjut yang telah dilakukan terhadap 5399 rekomendasi adalah sebagai berikut:

- | | |
|---------------------------------------|-------------------|
| 1. Kategori selesai (S) | : 5.041 (72.46 %) |
| 2. Kategori dalam proses (D) | : 1.319 (18.96 %) |
| 3. Kategori belum ditindaklanjuti (B) | : 597 (8.58 %) |

b) Dari rekomendasi yang bersifat kerugian/kewajiban setor senilai Rp 137.496.071.437,61,- seluruhnya masih dalam proses penyelesaian.

3) Penyelesaian Tindak Lanjut Inspektorat Provinsi Sumatera Utara pada Kabupaten/Kota berdasarkan hasil pemutakhiran per-Desember 2020 sebesar 72,77%.

Rincian hasil tindak lanjut pemeriksaan OPD/BUMD Provinsi Sumatera Utara:

d.OPD/BUMD Pemerintah Provinsi Sumatera Utara

Temuan 2020

1) Temuan

Hasil Pemeriksaan Reguler Inspektorat Provinsi Sumatera Utara pada 53 OPD/BUMD Pemerintah Provinsi Sumatera Utara TA. 2020 terdapat 3.674 temuan dan 4.475 rekomendasi dengan nilai kerugian negara/daerah sebesar Rp.40.151.341.370,22,-

2) Hasil tindak lanjut

a) Tindak lanjut yang telah dilakukan terhadap 4.475 rekomendasi adalah sebagai berikut :

- | | |
|---------------------------------------|-------------------|
| 1. Kategori selesai (S) | : 3.802 (84,96 %) |
| 2. Kategori dalam proses (D) | : 296 (6,61%) |
| 3. Kategori belum ditindaklanjuti (B) | : 377 (8,42 %) |

- b) Dari rekomendasi yang bersifat kerugian negara/daerah senilai Rp.40.151.341.370,22,- telah ditindaklanjuti mengerjakan/menyetorkan ke Kas Daerah sebesar Rp.18.757.881.342,32 dan sisanya sebesar Rp.21.393.460.027,90,- masih dalam proses penyelesaian.
- 3) Penyelesaian Tindak Lanjut Inspektorat Provinsi Sumatera Utara pada OPD/BUMD berdasarkan hasil pemutakhiran per- Desember 2020 sebesar 84,96%.

3. Sasaran Kedua: Meningkatnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi.

- **Level Maturitas SPIP Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara sesuai PP No.60 Tahun 2008**

Target: Level 3, realisasi: Level 3 terdefinisi, capaian kinerja: 100% (BAIK)

Keberhasilan capaian kinerja dikarenakan:

1. Tim Satgas SPIP Provinsi Sumatera Utara diaktifkan kembali dan melakukan tugasnya dengan intensif untuk mengejar ketertinggalan pada tahun-tahun sebelumnya;
2. Komitmen yang tinggi dari Inspektur Provinsi Sumatera Utara dan pimpinan OPD Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara dalam pelaksanaan SPIP.

4. Sasaran Kedua: Meningkatnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi.

- **Meningkatnya level Kapabilitas APIP Inspektorat sesuai Perka BPKP No.16 Tahun 2015**

Target: Level 2 menuju level 3 dengan peningkatan, realisasi: level 2 plus, capaian kinerja: 100% (BAIK)

Berdasarkan Laporan Hasil Penjaminan Kualitas atas Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP (Aparat Pengawas Internal Pemerintah) level 2 menuju level 3 dengan peningkatan nilai pada Inspektorat Provinsi Sumatera Utara nomor LQAPIP-953/PW02/6/2020 tanggal 30 Desember 2020 dari Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Sumatera Utara, level Kapabilitas APIP pada Inspektorat Provinsi Sumatera Utara berada pada level 2 (dua) Plus dengan rincian sebagai berikut :

- a. Elemen 1 Peran dan Layanan berada pada level 2 (dua)
- b. Elemen 2 Pengelolaan SDM berada pada level 2 (dua) mengalami peningkatan menjadi level 3 (tiga)
- c. Elemen 3 Praktik Profesional berada pada level 2 (dua)
- d. Elemen 4 Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja berada pada level 2 (dua) mengalami peningkatan menjadi level 3 (tiga)
- e. Elemen 5 Budaya dan Hubungan Organisasi berada pada level 3 (tiga)
- f. Elemen 6 Struktur Tata Kelola berada pada level 2 (dua)

Inspektorat Provinsi Sumatera Utara telah menindaklanjuti saran berdasarkan Laporan Bimbingan Teknis Peningkatan Kapabilitas APIP pada Inspektorat Provinsi Sumatera Utara nomor LBINAPIP-593/PW02/6/2020 tanggal 12 Oktober 2020 antara lain melaksanakan audit kinerja, melaksanakan tindak lanjut saran hasil telaahan sejawat yang dilakukan Inspektorat Provinsi Aceh, membentuk Tim/Dewan Pengawas, menyusun Tim Penyelesaian Kerugian Daerah dan Pemberi Dukungan kepada Inspektorat Provinsi Sumatera Utara.

3.4 Penyerapan Anggaran

Anggaran yang disediakan dalam rangka pencapaian target sasaran Inspektorat Provinsi Sumatera Utara tahun 2020 (setelah perubahan APBD) seluruhnya mencapai Rp. 51.369.112.372,- sampai dengan bulan Desember 2020 realisasi anggaran sebesar Rp. 49.454.182.667,- atau 96,27%, dengan rincian sebagai berikut:

- a. Elemen 1 Peran dan Layanan berada pada level 2 (dua)
- b. Elemen 2 Pengelolaan SDM berada pada level 2 (dua) mengalami peningkatan menjadi level 3 (tiga)
- c. Elemen 3 Praktik Profesional berada pada level 2 (dua)
- d. Elemen 4 Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja berada pada level 2 (dua) mengalami peningkatan menjadi level 3 (tiga)
- e. Elemen 5 Budaya dan Hubungan Organisasi berada pada level 3 (tiga)
- f. Elemen 6 Struktur Tata Kelola berada pada level 2 (dua)

Inspektorat Provinsi Sumatera Utara telah menindaklanjuti saran berdasarkan Laporan Bimbingan Teknis Peningkatan Kapabilitas APIP pada Inspektorat Provinsi Sumatera Utara nomor LBINAPIP-593/PW02/6/2020 tanggal 12 Oktober 2020 antara lain melaksanakan audit kinerja, melaksanakan tindak lanjut saran hasil telaahan sejawat yang dilakukan Inspektorat Provinsi Aceh, membentuk Tim/Dewan Pengawas, menyusun Tim Penyelesaian Kerugian Daerah dan Pemberi Dukungan kepada Inspektorat Provinsi Sumatera Utara.

3.4 Penyerapan Anggaran

Anggaran yang disediakan dalam rangka pencapaian target sasaran Inspektorat Provinsi Sumatera Utara tahun 2020 (setelah perubahan APBD) seluruhnya mencapai Rp. 51.369.112.372,- sampai dengan bulan Desember 2020 realisasi anggaran sebesar Rp. 49.454.182.667,- atau 96,27%, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.4

Penyerapan Anggaran Kegiatan Inspektorat

NO	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN	PENYERAPAN	
			(Rp)	%
1	2	3	4	5
I	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	4.883.131.750	4.464.639.824	91,43%
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	75.496.000	75.344.500	99,80%
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	932.400.000	744.790.434	78,88%
3	Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran	1.318.769.440	1.311.040.419	99,41%
4	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	1.679.008.800	1.468.486.121	87,45%
5	Penyediaan Alat Tulis Kantor	98.549.610	94.706.000	96,10%
6	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	174.998.900	174.897.150	99,94%
7	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	11.868.000	11.865.000	99,97%
8	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	40.500.000	40.500.000	100%
9	Penyediaan Makan dan Minuman	179.200.000	179.088.000	99,94%
10	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	372.341.000	363.922.200	97,74%
II	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1.522.904.760	1.415.290.420	92,93%
1	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	148.738.000	146.664/375	98,61%

NO	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN	PENYERAPAN	
			(Rp)	%
1	2	3	4	5
2	Pengadaan Meubelair	-	-	-
3	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	769.998.815	766.704.000	99,57%
4	Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas/operasional	458.842.945	419.372.045	91,40%
5	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	139.325.000	76.550.000	54,94%
6	Pengadaan Peralatan Penunjang Pengawasan	-	-	-
7	Pengadaan Peralatan Penunjang Pengawasan	6.000.000	6.000.000	100%
III	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	-	-	-
1	Pengadaan pakaian Dinas	-	-	-
IV	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	1,041,514,000	952,963,627	91.50%
1	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	24.137.400	24.137.400	100%
2	Peningkatan Manajemen Aset/Barang Daerah	69.000.000	67.000.000	97,10%
3	Bimbingan Jasmani PNS di Lingkungan Inspektorat	-	-	-
4	Pengolahan Data SIMPEG	17.744.000	17.744.000	100.00%
5	Family Gathering Inspektorat Provsu	-	-	-
6	Pengembangan sistem informasi manajemen pengawasan terintegrasi	86.200.000	85.950.000	99,71%
V	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	284.632.210	281.449.300	98,88%
1	Penyusunan Renja dan P.Renja, RKA Tahunan dan RKA-P, DPA dan DPPA serta Renstra SKPD	183.842.460	182.999.300	99,54%
2	Penyusunan Laporan Kinerja Inspektorat Provinsi Sumatera Utara	31.200.000	31.200.000	100%

NO	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN	PENYERAPAN	
			(Rp)	%
1	2	3	4	5
3	Penyusunan LKPJ dan LPPD	13.500.000	13.500.000	100%
4	Penyusunan CaLK, LRA dan NERACA	37.289.750	35.100.000	94,13%
5	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	18.800.000	18.650.000	99,20%
VI	Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Negara	11.470.790.252	11.098.288.760	96,75%
1	Pelatihan Kantor Sendiri (PKS)	7.200.000	7.200.000	100%
2	Rapat Koordinasi Pengawasan Daerah	8.900.000	8.800.000	98,88%
3	Koordinasi dan Konsultasi Program Pengawasan dan Tugas Lain dengan Kantor Kementerian, Setneg serta Itjen Kementerian dan Inspektorat Provinsi Lainnya	70.000.000	69.136.716	98,77%
4	Survey Penilaian Integritas dan Kepuasan Masyarakat	-	-	-
5	Pemeriksaan Tujuan Tertentu	449.820.000	443.935.500	98,69%
6	Penanganan Kasus Pengaduan Masyarakat dilingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara	1.578.833.348	1.578.381.598	99,97%
7	Pembinaan dan Pengawasan Umum Teknis oleh Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Se-Sumatera Utara	-	-	-
8	Pembinaan dan Pengawasan OPD dan BUMD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Audit Kinerja)	4.211.188.700	4.122.863.542	97,90%
9	Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Se-Sumatera Utara	740.400.100	738.914.000	99,80%
10	Monitoring Persiapan Pelaksanaan dan Evaluasi Terhadap Penyelesaian TLHP BPK RI Perwakilan Provsu	204.700.000	204.600.000	99,95%

NO	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN	PENYERAPAN	
			(Rp)	%
1	2	3	4	5
11	Monitoring dan Evaluasi SAKIP pada OPD Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota	163.539.000	163.339.000	99,88%
12	Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	123.595.000	123.595.000	100%
13	Reviu Dokumen Perencanaan dan Pembangunan serta Pelaksanaan Kinerja Pelaksanaan Anggaran	253.764.800	135.876.000	53,54%
14	Monitoring dan Evaluasi TLHP Inspektorat Provinsi pada Pemerintah Kabupaten/Kota se-Sumatera Utara	308.900.000	308.534.000	99,88%
15	Penunjang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Sumatera Utara	1.209.600.000	1.106.000.000	91,44%
16	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Itjen Kemendagri	45.900.000	45.900.000	100%
17	Pemeriksaan penggunaan dana BOS SMA/SMK se-Sumatera Utara	11.377.000	11.377.000	100%
18	Monitoring dan Evaluasi Pelayanan Publik	58.059.804	58.059.804	100%
19	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Inspektorat Provinsi Sumatera Utara pada OPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara	200.000.000	199.800.000	99,90%
20	Monitoring dan Evaluasi LHKPN/LHKASN di Lingkungan Pemprovsu	31.200.000	31.200.000	100%
21	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Dana Desa	-	-	-
22	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Penanganan Kasus Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara	98.028.000	97.250.000	99,21%
23	Pendukung Kegiatan Sekretariat JFA /P2UPD	150.000.000	149.977.000	99,98%
24	Peran serta Inspektorat dalam RAKORWASNAS	-	-	-

NO	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN	PENYERAPAN	
			(Rp)	%
1	2	3	4	5
25	Monitoring dan Evaluasi Penerapan Reformasi Birokrasi & Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani	88.701.000	78.390.000	88,38%
26	Peningkatan Nilai Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara	120.000.000	96.398.000	80,33%
27	Rapat Koordinasi Pemutakhiran Data TLHP Inspektorat Provinsi dengan OPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara	700.000	540.000	77,14%
28	Rapat Koordinasi Pembahasan TLHP BPK dengan OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara	700.000	320.000	45,71%
29	Pra Pemutakhiran Data Hasil Pemeriksaan Itjen Depdagri dan Departemen lainnya serta Pengaduan Masyarakat	-	-	-
30	Rapat Pemutakhiran Data Hasil Pemeriksaan Itjen Kemendagri dan Pengaduan Masyarakat	21.905.300	21.905.300	100%
31	Koordinasi dan Pendampingan terhadap pemeriksaan yang dilakukan BPK RI pada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara	42.200.000	42.200.000	100%
32	Rapat Koordinasi Pemutakhiran Data TLHP Inspektorat Provinsi Sumatera Utara dengan Inspektorat Kabupaten/Kota se Sumatera Utara	2.721.000	2.400.000	88,20%
33	Rapat Koordinasi Pembahasan dan Penyusunan Peta Pengawasan/PKPT Inspektorat Provinsi Sumatera Utara pada Pemerintah Kabupaten/Kota Se-Sumatera Utara	49.233.800	48.620.000	98,75%

INSPEKTORAT PROVSU

NO	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN	PENYERAPAN	
			(Rp)	%
1	2	3	4	5
34	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Peta Pengawasan/PKPT dan Penerapan Kebijakan Pengawasan Inspektorat Provinsi Sumatera Utara pada Pemerintah Kabupaten/Kota Se-Sumatera Utara	69.709.000	69.709.000	100%
35	Pelatihan Peningkatan Kapasitas Tenaga Auditor dan P2UPD serta Fungsional Umum	76.038.200	76.038.200	100%
36	Sekretariat Rencana aksi program koordinasi supervisi pencegahan (Korsupgah) KPK-RI pada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara	166.854.200	159.310.000	95,48%
37	Sapu Bersih Pungutan Liar di Provinsi Sumatera Utara	840.490.000	836.239.100	99,49%
38	Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Responsiv Gender	-	-	-
39	Peningkatan Nilai Kapabilitas Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP)	60.232.000	55.180.000	91,61%
40	Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stratnas-PK) dan Strasda pada Provinsi Sumatera Utara	6.300.000	6.300.000	100%
41	Fasilitasi/Pembentukan Kerjasama antar daerah dalam Pengawasan yang lebih komprehensif	-	-	-
	BELANJA LANGSUNG	18.358.540.372	17.454.499.704	95,08%
	BELANJA TIDAK LANGSUNG	33.010.572.000	31.999.682.963	96,94%
	JUMLAH	51.369.112.372	49.454.182.667	96,27%

BAB IV KESIMPULAN

Secara umum dapat disimpulkan bahwa indikator kinerja Inspektorat Provinsi Sumatera Utara sudah tercapai seluruhnya sesuai target yang diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2020 dengan rincian sebagai berikut:

4.1 Capaian Kinerja

4.1.1 Capaian Indikator Kinerja Tahun 2020

Dari 2 (dua) indikator kinerja utama Inspektorat, 4 (empat) indikator kinerja capaiannya baik yaitu :

- a . Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI pada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dengan capaian 83,64 %.
- b . Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan Itjen Kemendagri pada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dengan capaian 100 %.
- c . Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan Inspektorat pada OPD Provinsi Sumatera Utara dan Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara dengan capaian 78,87 %.
- d . Meningkatnya level kapabilitas APIP Inspektorat, sesuai Perka BPKP No.16 Tahun 2015 dengan capaian Level 2 Plus.

Indikator kinerja yang belum bisa diketahui pasti capaiannya ada 2 (dua) yaitu:

- a . Opini BPK-RI terhadap LKPD Pemerintah Provinsi Sumatera Utara
Opini Badan Pemeriksa Keuangan untuk Laporan Keuangan tahun 2020 belum diketahui, karena pelaksanaan reviu Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara baru dilaksanakan pada minggu keempat bulan Januari tahun 2021 dan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan rencananya akan disampaikan pada Bulan Mei tahun berjalan.
- b . Level Maturitas SPIP Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara sesuai PP No.60 Tahun 2008

Hasil penilaian Reviu oleh BPKP Perwakilan Provinsi Sumatera Utara dalam peningkatan level maturitas SPIP tahun 2020 tidak dilaksanakan karena Inspektorat Provinsi Sumatera Utara belum menyampaikan self assessment kepada BPKP Perwakilan Provinsi Sumatera Utara. Hal ini dikarenakan seluruh OPD Provinsi Sumatera Utara yang menjadi sample penilaian maturitas SPIP belum memnuhi dokumen yang dibutuhkan. Upaya peningkatan level maturitas SPIP menjadi level 3 (tiga) masih terus dilakukan sampai dengan bulan Desember 2020, sehingga hasil penilaian Reviu BPKP Provinsi Sumatera Utara diperkirakan baru diterima pada bulan Maret 2021.

4.1.2 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2020 dengan Tahun 2019

Secara umum perbandingan realisasi kinerja antara tahun 2020 dan 2019 tidak terlalu berbeda jauh. Untuk pencapaian target akumulasi meningkat. Pencapaian yang didapat pada tahun 2020 adalah :

- a) Opini BPK-RI terhadap LKPD Pemerintah Provinsi Sumatera Utara mendapatkan opini WTP dan ini menjadikan kelima kali berturut-turut Provinsi Sumatera Utara mendapat opini WTP dari BPK RI.
- b) Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI pada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dengan capaian 83,64%.
- c) Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Itjen Kemendagri pada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dengan capaian 100%.
- d) Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Inspektorat pada OPD Provinsi Sumatera Utara dan Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara dengan capaian 78,87%.
- e) Level maturitas SPIP Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara mencapai level 3 terdefinisi berdasarkan Reviu dari BPKP Perwakilan Provinsi Sumatera Utara.
- f) Inspektorat Provinsi Sumatera Utara menjadi APIP dengan level kapabilitasnya adalah Level 2 Plus berdasar *assessment* dari BPKP.

4.2 Realisasi Anggaran

Capaian indikator kinerja tahun 2020 didukung dengan anggaran yang bersumber dari DPA Inspektorat Provinsi Sumatera Utara 4.02.01. Anggaran

belanja langsung tersebut dituangkan dalam 6 (enam) program dan 70 (tujuh puluh) kegiatan, dari seluruh kegiatan yang terealisasi jika dipersentasikan terbesar 96,27% dengan kriteria sangat tinggi.

Tabel 4.1
Realisasi Anggaran Tahun 2020

NO	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI KEUANGAN	
			(Rp)	%
1	2	3	4	5
I	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	4.883.131.750	4.464.639.824	91,43%
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	75.496.000	75.344.500	99,80%
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	932.400.000	744.790.434	78,88%
3	Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran	1.318.769.440	1.311.040.419	99,41%
4	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	1.679.008.800	1.468.486.121	87,45%
5	Penyediaan Alat Tulis Kantor	98.549.610	94.706.000	96,10%
6	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	174.998.900	174.897.150	99,94%
7	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	11.868.000	11.865.000	99,97%
8	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	40.500.000	40.500.000	100%
9	Penyediaan Makan dan Minuman	179.200.000	179.088.000	99,94%
10	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	372.341.000	363.922.200	97,74%
II	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1.522.904.760	1.415.290.420	92,93%
1	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	148.738.000	146.664/375	98,61%
2	Pengadaan Meubelair	-	-	-
3	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	769.998.815	766.704.000	99,57%
4	Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas/operasional	458.842.945	419.372.045	91,40%
5	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	139.325.000	76.550.000	54,94%
6	Pengadaan Peralatan Penunjang Pengawasan	-	-	-
7	Pengadaan Peralatan Penunjang Pengawasan	6.000.000	6.000.000	100%

NO	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI KEUANGAN	
			(Rp)	%
1	2	3	4	5
III	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	-	-	-
1	Pengadaan pakaian Dinas	-	-	-
IV	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	1,041,514,000	952,963,627	91.50%
1	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	24.137.400	24.137.400	100%
2	Peningkatan Manajemen Aset/Barang Daerah	69.000.000	67.000.000	97,10%
3	Bimbingan Jasmani PNS di Lingkungan Inspektorat	-	-	-
4	Pengolahan Data SIMPEG	17.744.000	17.744.000	100.00%
5	Family Gathering Inspektorat Provsu	-	-	-
6	Pengembangan sistem informasi manajemen pengawasan terintegrasi	86.200.000	85.950.000	99,71%
V	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	284.632.210	281.449.300	98,88%
1	Penyusunan Renja dan P.Renja, RKA Tahunan dan RKA-P, DPA dan DPPA serta Renstra SKPD	183.842.460	182.999.300	99,54%
2	Penyusunan Laporan Kinerja Inspektorat Provinsi Sumatera Utara	31.200.000	31.200.000	100%
3	Penyusunan LKPJ dan LPPD	13.500.000	13.500.000	100%
4	Penyusunan CaLK, LRA dan NERACA	37.289.750	35.100.000	94,13%
5	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	18.800.000	18.650.000	99,20%

NO	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI KEUANGAN	
			(Rp)	%
1	2	3	4	5
VI	Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Negara	11.470.790.252	11.098.288.760	96,75%
1	Pelatihan Kantor Sendiri (PKS)	7.200.000	7.200.000	100%
2	Rapat Koordinasi Pengawasan Daerah	8.900.000	8.800.000	98,88%
3	Koordinasi dan Konsultasi Program Pengawasan dan Tugas Lain dengan Kantor Kementerian, Setneg serta Itjen Kementerian dan Inspektorat Provinsi Lainnya	70.000.000	69.136.716	98,77%
4	Survey Penilaian Integritas dan Kepuasan Masyarakat	-	-	-
5	Pemeriksaan Tujuan Tertentu	449.820.000	443.935.500	98,69%
6	Penanganan Kasus Pengaduan Masyarakat dilingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara	1.578.833.348	1.578.381.598	99,97%
7	Pembinaan dan Pengawasan Umum Teknis oleh Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Se-Sumatera Utara	-	-	-
8	Pembinaan dan Pengawasan OPD dan BUMD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Audit Kinerja)	4.211.188.700	4.122.863.542	97,90%
9	Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Se-Sumatera Utara	740.400.100	738.914.000	99,80%
10	Monitoring Persiapan Pelaksanaan dan Evaluasi Terhadap Penyelesaian TLHP BPK RI Perwakilan Provsu	204.700.000	204.600.000	99,95%
11	Monitoring dan Evaluasi SAKIP pada OPD Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota	163.539.000	163.339.000	99,88%
12	Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	123.595.000	123.595.000	100%
13	Reviu Dokumen Perencanaan dan Pembangunan serta Pelaksanaan Kinerja Pelaksanaan Anggaran	253.764.800	135.876.000	53,54%

NO	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI KEUANGAN	
			(Rp)	%
1	2	3	4	5
14	Monitoring dan Evaluasi TLHP Inspektorat Provinsi pada Pemerintah Kabupaten/Kota se-Sumatera Utara	308.900.000	308.534.000	99,88%
15	Penunjang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Sumatera Utara	1.209.600.000	1.106.000.000	91,44%
16	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Itjen Kemendagri	45.900.000	45.900.000	100%
17	Pemeriksaan penggunaan dana BOS SMA/SMK se-Sumatera Utara	11.377.000	11.377.000	100%
18	Monitoring dan Evaluasi Pelayanan Publik	58.059.804	58.059.804	100%
19	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Inspektorat Provinsi Sumatera Utara pada OPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara	200.000.000	199.800.000	99,90%
20	Monitoring dan Evaluasi LHKPN/LHKASN di Lingkungan Pemprov	31.200.000	31.200.000	100%
21	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Dana Desa	-	-	-
22	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Penanganan Kasus Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara	98.028.000	97.250.000	99,21%
23	Pendukung Kegiatan Sekretariat JFA /P2UPD	150.000.000	149.977.000	99,98%
24	Peran serta Inspektorat dalam RAKORWASNAS	-	-	-
25	Monitoring dan Evaluasi Penerapan Reformasi Birokrasi & Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani	88.701.000	78.390.000	88,38%
26	Peningkatan Nilai Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara	120.000.000	96.398.000	80,33%

NO	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI KEUANGAN	
			(Rp)	%
1	2	3	4	5
27	Rapat Koordinasi Pemutakhiran Data TLHP Inspektorat Provinsi dengan OPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara	700.000	540.000	77,14%
28	Rapat Koordinasi Pembahasan TLHP BPK dengan OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara	700.000	320.000	45,71%
29	Pra Pemutakhiran Data Hasil Pemeriksaan Itjen Depdagri dan Departemen lainnya serta Pengaduan Masyarakat	-	-	-
30	Rapat Pemutakhiran Data Hasil Pemeriksaan Itjen Kemendagri dan Pengaduan Masyarakat	21.905.300	21.905.300	100%
31	Koordinasi dan Pendampingan terhadap pemeriksaan yang dilakukan BPK RI pada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara	42.200.000	42.200.000	100%
32	Rapat Koordinasi Pemutakhiran Data TLHP Inspektorat Provinsi Sumatera Utara dengan Inspektorat Kabupaten/Kota se Sumatera Utara	2.721.000	2.400.000	88,20%
33	Rapat Koordinasi Pembahasan dan Penyusunan Peta Pengawasan/PKPT Inspektorat Provinsi Sumatera Utara pada Pemerintah Kabupaten/Kota Se-Sumatera Utara	49.233.800	48.620.000	98,75%
34	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Peta Pengawasan/PKPT dan Penerapan Kebijakan Pengawasan Inspektorat Provinsi Sumatera Utara pada Pemerintah Kabupaten/Kota Se-Sumatera Utara	69.709.000	69.709.000	100%
35	Pelatihan Peningkatan Kapasitas Tenaga Auditor dan P2UPD serta Fungsional Umum	76.038.200	76.038.200	100%
36	Sekretariat Rencana aksi program koordinasi supervisi pencegahan (Korsupgah) KPK-RI pada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara	166.854.200	159.310.000	95,48%

NO	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI KEUANGAN	
			(Rp)	%
1	2	3	4	5
37	Sapu Bersih Pungutan Liar di Provinsi Sumatera Utara	840.490.000	836.239.100	99,49%
38	Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Responsiv Gender	-	-	-
39	Peningkatan Nilai Kapabilitas Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP)	60.232.000	55.180.000	91,61%
40	Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stratnas-PK) dan Strasda pada Provinsi Sumatera Utara	6.300.000	6.300.000	100%
41	Fasilitasi/Pembentukan Kerjasama antar daerah dalam Pengawasan yang lebih konprehensif	-	-	-
BELANJA LANGSUNG		18.358.540.372	17.454.499.704	95,08%
BELANJA TIDAK LANGSUNG		33.010.572.000	31.999.682.963	96,94%
JUMLAH		51.369.112.372	49.454.182.667	96,27%

4.3. Langkah-Langkah untuk Peningkatan Kinerja Tahun 2020

Langkah dan upaya yang dilakukan Inspektorat untuk meningkatkan kinerja tahun 2020 adalah:

1. Terkait dengan Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 21 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 39 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Badan Daerah dan Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Utara, ada perubahan susunan organisasi baru, sehingga perlu adanya konsolidasi ulang pembagian tugas kerja di internal struktur organisasi Inspektorat;
2. Menyusun Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) tematik dan berbasis risiko dengan lebih meningkatkan aspek kehati-hatian terhadap distribusi SDM dan anggaran, sehingga dengan SDM dan anggaran yang terbatas, semua tujuan dan sasaran Inspektorat bisa dicapai pada akhir tahun;
3. Provinsi Sumatera Utara menurut opini BPK memperoleh opini wajar tanpa pengecualian (WTP) untuk tahun 2019, laporan kinerja telah menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi

keuangan Pemprov Sumut tanggal 31 Desember 2019. Selama 6 (enam) tahun berturut-turut Provinsi Sumatera Utara mendapatkan opini WTP dan diharapkan dapat mempertahankan pencapaian tersebut dengan peningkatan kapasitas dan kualitas dalam melakukan reviu laporan keuangan.

4. Maturitas Penyelenggaraan SPIP pada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019 telah mencapai Level 3 terdefinisi, sehingga masih diperlukan upaya-upaya pengimplementasian dan pemenuhan yang signifikan dari level 3 dengan nilai capaian 3,226. Dengan tercapainya level 3 SPIP maka APIP diharapkan lebih efektif melakukan pendampingan kepada seluruh counterpart pada setiap OPD, BUMD dan Pemerintah Kabupaten/Kota untuk mengimplementasikan SPIP sekurang-kurangnya pada maturitas level 3.
5. Level Kapabilitas APIP Inspektorat Provinsi Sumatera Utara Tahun 2020 memiliki target capaian Level 2 Plus, sehingga sampai dengan saat ini masih dilakukan upaya-upaya perbaikan guna meningkatkan level capaian dari level 2 (dua) Plus menjadi level 3 (tiga) di tahun 2021.

BAB V

PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Inspektorat Provinsi Sumatera Utara Tahun 2020 merupakan dokumen yang memuat perencanaan kinerja, akuntabilitas kinerja, dan kesimpulan tahun 2020 serta langkah-langkah peningkatan kinerja tahun 2021.

Inspektorat akan terus secara konsisten berupaya untuk meningkatkan kinerja pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah oleh OPD dan BUMD Provinsi Sumatera Utara, Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa..

Inspektorat Provinsi Sumatera Utara bertekad menjadi mitra kerja positif OPD dan BUMD Provinsi Sumatera Utara, Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa untuk mewujudkan Sumatera Utara Bermartabat melalui pemerintahan yang bersih, dicintai, tata kelola pemerintahan yang baik, adil dan terpercaya. Untuk itu sangat perlu didukung seluruh pemangku kepentingan.

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**



REVISI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Lasro Marbun
Jabatan : Inspektur Provinsi Sumatera Utara
Selanjutnya disebut **pihak pertama**

Nama : Edy Rahmayadi
Jabatan : Gubernur Sumatera Utara
Selaku atasan langsung pihak pertama selanjutnya disebut **pihak kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Medan, 2020

Pihak Kedua,
GUBERNUR SUMATERA UTARA

EDY RAHMAYADI

Pihak Pertama,
**INSPEKTUR PROVINSI
SUMATERA UTARA**

**LASRO MARBUN
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP.19641201 198701 1 002**

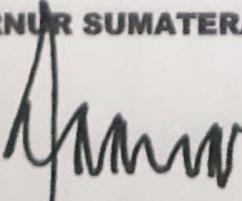
**REVISI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
INSPEKTORAT PROVINSI SUMATERA UTARA**

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya pengelolaan keuangan dan barang daerah sesuai Standar Akuntansi Pemerintah	1. Opini BPK-RI terhadap LKPD Pemerintah Provinsi Sumatera Utara	WTP
2	Meningkatnya Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI	1. Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI terhadap LKPD	82%
		2. Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Itjen Kemendagri	100%
		3. Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan Inspektorat Provsu	77%
3	Meningkatnya penerapan sistem pengendalian intern pemerintah pada OPD Provinsi Sumatera Utara	1. Level Maturitas SPIP Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara	Level 3
4	Dipenuhinya kualitas dan kuantitas aparat pengawasan yang optimal untuk pengawasan internal	1. Meningkatnya level kapabilitas Inspektorat	Level 2 menuju level 3 dengan peningkatan nilai

NO	PROGRAM		ANGGARAN	KETERANGAN
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp.	5,010,912,710.00	APBD
2.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Rp.	1,429,804,760.00	APBD
3.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Rp.	-	APBD
4.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Rp.	330,900,000.00	APBD
5.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Rp.	226,389,000.00	APBD
6.	Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Negara	Rp.	10,663,493,702.00	APBD
	Jumlah	Rp.	17,661,500,172.00	

Medan, 2020

GUBERNUR SUMATERA UTARA


EDY RAHMAYADI

**INSPEKTUR PROVINSI
SUMATERA UTARA**


**LASRO MARBUN
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19641201 198701 1 002**

**RENCANA AKSI
INSPEKTORAT PROVINSI SUMATERA UTARA**

SASARAN			PROGRAM	KEGIATAN					KET
URAIAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET		URAIAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan di bidang keuangan	1. Opini BPK-RI terhadap LKPD Pemerintah Provinsi Sumatera Utara	TW I	-	Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Negara	Reviu pada Laporan Keuangan Gubernur Sumatera Sumatera Utara	Terlaksananya Reviu pada Laporan Keuangan OPD	Jumlah OPD yang direviu	TW I	-
		TW II	WTP					TW II	49 OPD
		TW III	-					TW III	-
		TW IV	-					TW IV	-
	2. Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI pada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara	TW I	77%	Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Negara	Evaluasi dan Monitoring Terhadap Penyelesaian TLHP BPK RI Perwakilan Provsu	Persentase Penyelesaian TLHP BPK RI	$\% = \frac{\text{Jlh. TL}}{\text{Jlh. Rekom}} \times 100\%$	TW I	77%
		TW II	79%					TW II	79%
		TW III	81%					TW III	81%
		TW IV	82%					TW IV	82%
	3. Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Itjen Kemdagri pada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara	TW I	80%	Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Negara	Evaluasi & Monitoring Terhadap penyelesaian TLHP Itjen Kemendagri	Persentase Penyelesaian TLHP Itjen Kemendagri	$\% = \frac{\text{Jlh. TL}}{\text{Jlh. Rekom}} \times 100\%$	TW I	80%
		TW II	85%					TW II	85%
		TW III	90%					TW III	90%
		TW IV	100%					TW IV	100%
	4. Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan ItprovSU pada OPD Provinsi Sumatera Utara dan Kabupaten/Kota	TW I	72%	Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Negara	Evaluasi & Monitoring Terhadap penyelesaian TLHP Inspektorat Provsu	Persentase Penyelesaian TLHP ItprovSU	$\% = \frac{\text{Jlh. TL}}{\text{Jlh. Rekom}} \times 100\%$	TW I	72%
		TW II	74%					TW II	74%
		TW III	76%					TW III	76%
		TW IV	77%					TW IV	77%
2. Meningkatnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi	1. Level Maturitas SPIP Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara sesuai PP No. 60 Tahun 2008	TW I	-	Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Negara	Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah sesuai dengan PP No.60 Tahun 2008	Level	Nilai Maturitas	TW I	-
		TW II	-					TW II	-
		TW III	-					TW III	-
		TW IV	3.0					TW IV	3.0
	2. Meningkatnya level kapabilitas APIP Inspektorat, sesuai Perka BPKP No.16 Tahun 2015	TW I	-	Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Negara	Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP)	Level	Nilai Kapabilitas	TW I	-
		TW II	-					TW II	-
		TW III	-					TW III	-
		TW IV	2 (DC)					TW IV	2 (DC)

Medan,
2021


INSPEKTORAT
 PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA
 HASRO MARBUN
 PEMBINA UTAMA MADYA
 NIP. 19741201 198701 1 002

RENCANA AKSI
INSPEKTORAT PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2020

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	TRIWULAN				ANGGARAN (Rp)	CAPAIAN KINERJA (%)	KET.	
						I	II	III	IV				
1	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan di bidang keuangan	1 Opini BPK-RI terhadap LKPD Pemerintah Provinsi Sumatera Utara	WTP	Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Negara	Revisi pada Laporan Keuangan Gubernur Sumatera Utara	49 OPD				170.000.000	100%		
		2 Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI pada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara	82%	Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Negara	Evaluasi dan Monitoring Terhadap Penyelesaian TLHP BPK RI Perwakilan Provsu	77%	79%	81%	82%	61.500.000	100%		
		3 Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Itjen Kemdagri pada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara	100%	Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Negara	100%	Evaluasi & Monitoring Terhadap penyelesaian TLHP Itjen Kemendagri	80%	85%	90%	100%	51.400.000	100%	
		4 Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Itprovsu pada OPD Provinsi Sumatera Utara dan Kaupaten/Kota	77%	Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Negara	77%	Evaluasi & Monitoring Terhadap penyelesaian TLHP Inspektorat Provsu	72%	74%	76%	77%	468.900.000	100%	
2	Meningkatnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi	1 Level Maturitas SPIP Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara sesuai PP No. 60 Tahun 2008	3,25	Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Negara	Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah sesuai dengan PP No.60 Tahun 2008					120.000.000	100%		
		2 Meningkatnya level kapabilitas APIP Inspektorat, sesuai Perka BPKP No.16 Tahun 2015	2 (DC)	Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Negara	Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP)						60.232.000	100%	



REVISI INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) 2019-2023

NAMA UNIT ORGANISASI : Inspektorat Provinsi Sumatera Utara

TUGAS : Membantu Gubernur dalam membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan

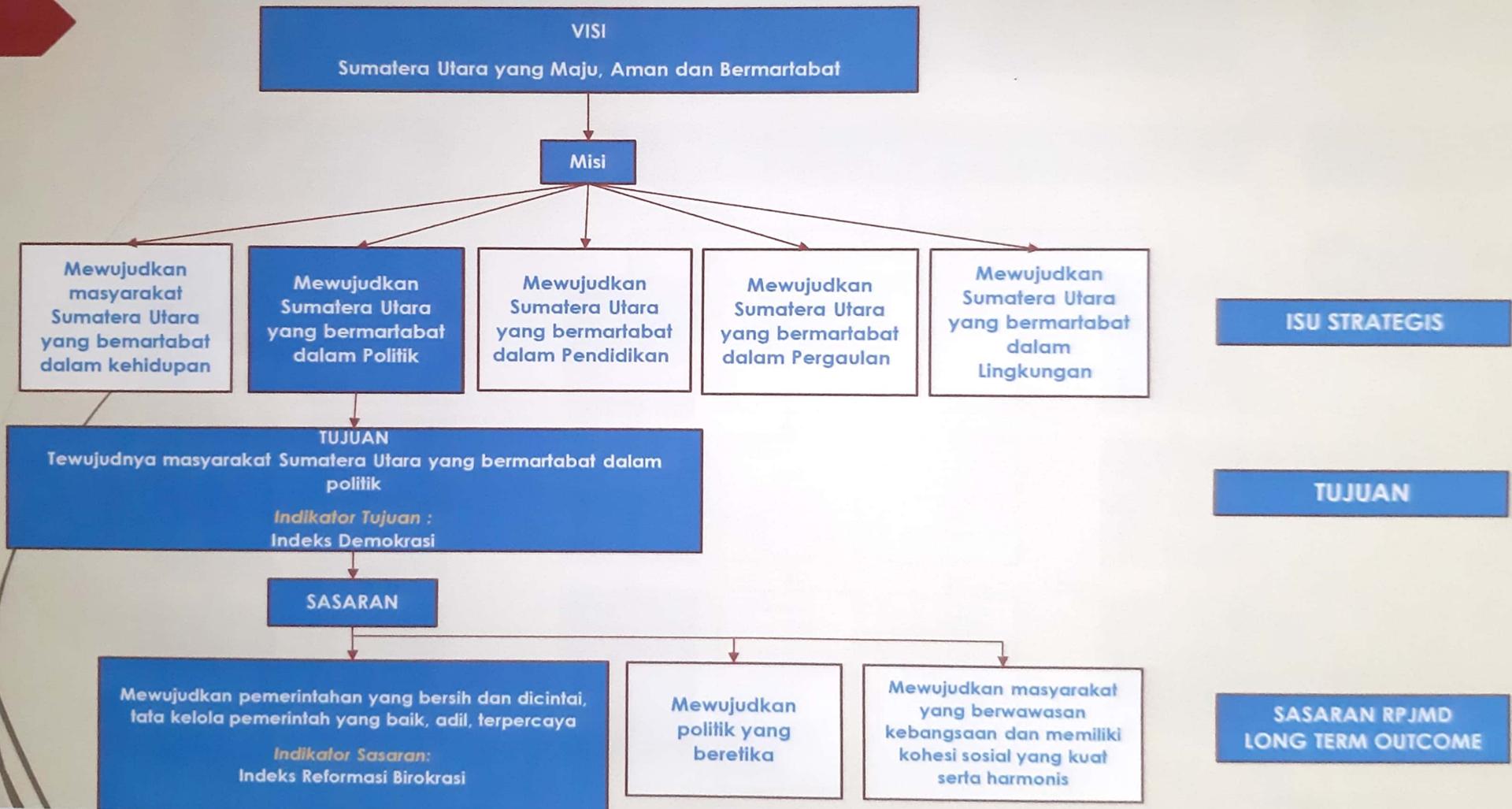
- FUNGSI**
1. Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitas pengawasan;
 2. Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan
 3. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Gubernur;
 4. Penyusunan laporan hasil pengawasan;
 5. Pelaksanaan administrasi Inspektorat Daerah Provinsi dan;
 6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

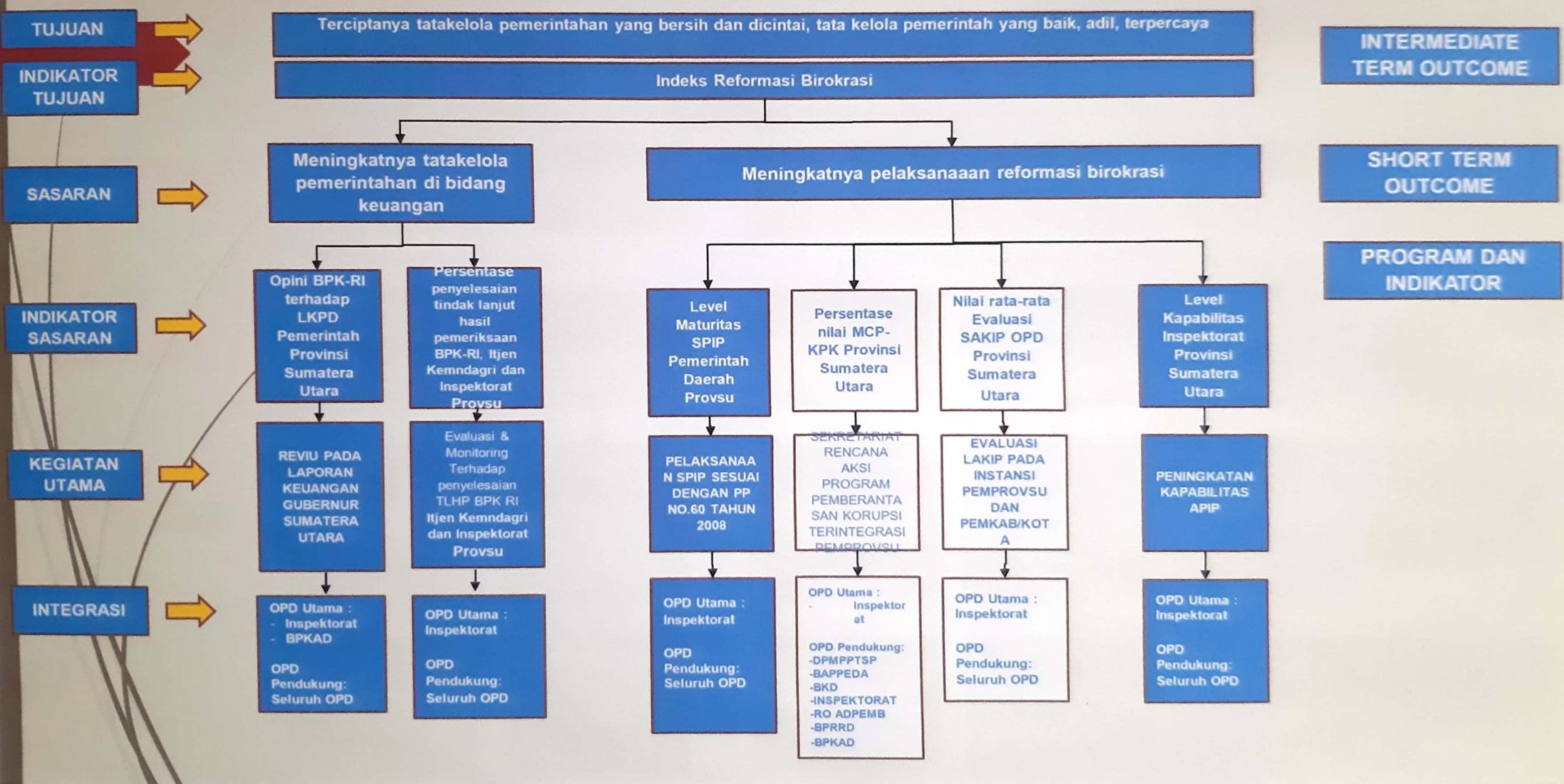
NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	KONDISI AWAL	TARGET TAHUNAN					SUMBER DATA	PENJELASAN APLIKASI
				2019	2020	2021	2022	2023		
1	Meningkatnya tata kelola pemerintahan di bidang keuangan	3 1 Opini BPK-RI terhadap LKPD Pemerintah Provinsi Sumatera Utara	4 WTP	5 WTP	6 WTP	7 WTP	8 WTP	9 WTP	10 Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara	Mengukur efektivitas kinerja Inspektorat dalam melakukan pemeriksaan, asistensi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara
2	Meningkatnya tata kelola pemerintahan di bidang keuangan	3 1 Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI pada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara	4 73%	5 80%	6 82%	7 83%	8 84%	9 85%	10 Berita Acara Hasil Pemutakhiran tindak lanjut temuan BPK-RI	Mengukur keberhasilan Inspektorat dalam membantu Gubernur dan mengawal akuntabilitas OPD Provinsi dalam menyelesaikan temuan hasil pemeriksaan BPK-RI atas LKPD Provinsi Sumatera Utara
		3 2 Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Ijten Kemendagri pada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara	4 100%	5 -	6 100%	7 100%	8 100%	9 100%	10 Berita Acara Hasil Pemutakhiran tindak lanjut temuan Ijten Kemendagri	Mengukur keberhasilan Inspektorat dalam membantu Gubernur dan mengawal akuntabilitas OPD Provinsi dalam menyelesaikan temuan hasil pemeriksaan Ijten Kemendagri
		3 3 Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Inspektorat pada OPD Provinsi Sumatera Utara dan Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara	4 75%	5 -	6 77%	7 78%	8 79%	9 80%	10 Berita Acara Hasil Pemutakhiran tindak lanjut temuan Inspektorat Provsu	Mengukur keberhasilan Inspektorat dalam membantu Gubernur dan mengawal akuntabilitas OPD Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam menyelesaikan temuan hasil pemeriksaan Inspektorat Provsu
3	Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	3 1 Level Maturitas SPIP Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara sesuai PP No. 60 Tahun 2008, unsur pengendalian terdiri dari 5 unsur yaitu: Lingkungan pengendalian Penilaian Resiko Kegiatan Pengendalian Informasi dan komunikasi Pemantauan dan pengendalian internal	4 Level 1,0	5 Level 3,0	6 Level 3,0 terdefinisi	7 Level 3 dengan peningkatan	8 Level 3,5	9 Level 3,5 terdefinisi	10 Hasil monitoring dan verifikasi terhadap pelaksanaan SPIP pada OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara	Mengukur keberhasilan Inspektorat dalam mensosialisasikan dan membina penerapan SPIP di lingkungan instansi pemerintah dalam rangka mendorong tercapainya reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintah yang baik

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	KONDISI AWAL	TARGET TAHUNAN					SUMBER DATA	PENJELASAN APLIKASI
				2019	2020	2021	2022	2023		
4	Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	1 Meningkatkan level kapabilitas APIP Inspektorat, sesuai Perka BPKP No. 16 Th. 2015, kapabilitas diukur dari 6 elemen area perubahan yaitu : Peran dan layanan Manajemen SDM Praktik profesional Akuntabilitas dan manajemen kinerja Hubungan dan budaya organisasi Struktur tatakelola	Level 2 (DC)	Level 2 menuju level 3 dengan peningkatan nilai	Level 2 Plus	Level 3	Level 3 plus	Level 4	Penilaian BPKP terhadap kapabilitas APIP Inspektorat Provinsi Sumatera Utara	Mengukur keberhasilan Inspektorat dari peran dan layanan APIP dari audit ketepatan merajai audit kinerja/Program evaluasi dan layanan konsultasi, Pengelolaan SDM, praktik profesional, serta akuntabilitas dan manajemen kinerja



RPJMD PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA 2019-2023





CASECADING INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA

TERCIPTANYA TATAKELOLA PEMERINTAHAN YANG BERSIH DAN DICINTAI, TATA KELOLA PEMERINTAH YANG BAIK, ADIL, TERPERCAYA

ESELON II

Meningkatnya Tatakelola Pemerintahan Di Bidang Keuangan

Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

ESELON III

Opini BPK-RI Terhadap LKPD Pemerintah Provinsi Sumatera Utara

Persentase Penyelesaian Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK-RI, Ijèn Kemdagri dan Inspektorat Provsu

Level Maturitas SPIP Daerah Provsu

Persentase Nilai MCP-KPK Provinsi Sumatera Utara

Nilai Rata-rata Evaluasi SAKIP OPD Provinsi Sumatera Utara

ESELON IV

Reviu Pada Laporan Keuangan Gubernur Sumatera Utara

Evaluasi & Monitoring Terhadap Penyelesaian TLHP BPK RI Ijèn Kemdagri dan Inspektorat Provsu

Pelaksanaan SPIP Sesuai Dengan PP No.60 Tahun 2008

Sekretariat Rencana Aksi Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi Pemprov

Evaluasi Lakap Pada Instansi Pemrov dan Pemkab/Kota

Level Kapabilitas Inspektorat Provinsi Sumatera Utara

Peningkatan Kapabilitas APiP

Unsur Lini : Auditor P2UPD
Unsur Pendukung: Fungsional Umum

Unsur Lini : Fungsional Umum

Unsur Lini : Auditor P2UPD
Unsur Pendukung: Fungsional Umum

Unsur Lini : Auditor P2UPD
Unsur Pendukung: Fungsional Umum

Unsur Lini : Auditor P2UPD
Unsur Pendukung: Fungsional Umum

Unsur Lini : Auditor P2UPD
Unsur Pendukung: Fungsional Umum